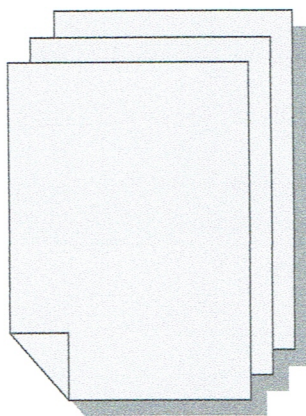




## **LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018**



**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP  
DAERAH PROVINSI JAMBI**

Jl.Rd. P.Kolopaking No.65 Telanaipura Jambi  
Telp. (0741) 61310 Fax. (0741) 61310 Kode Pos 36124

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

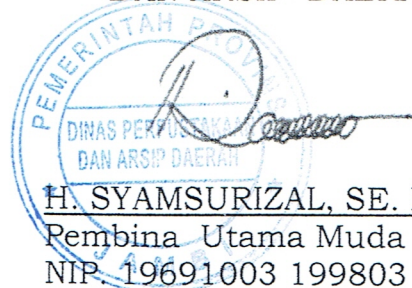
Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Penyusunan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi posisi Anggaran, realisasi anggaran, sisa lebih pembiayaan anggaran, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP).

Demikian pernyataan tanggungjawab ini kami buat, untuk bahan penyusunan laporan keuangan.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691003 199803 1 005

## KATA PENGANTAR.

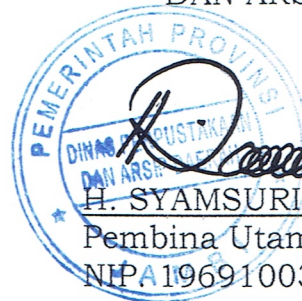
Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan Daerah secara profesional serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah (Organisasi Perangkat Daerah) selaku Pengguna Anggaran diwajibkan menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Daerah.

Maka untuk itu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi secara lebih komprehensif mengenai posisi keuangan Daerah, kondisi kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah.

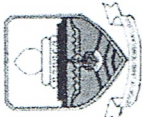
Melalui aplikasi pengelolaan keuangan penyelenggaraan keuangan Daerah, dengan salah satunya mendorong dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan keuangan daerah, dalam penyusunan laporan keuangan daerah berbasis teknologi informasi keuangan relevan, cepat, akurat dan diuji kebenarannya.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691003 199803 1 005





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

s.d 31 Desember 2018

Urusan Pemerintahan : 2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.17				Perpustakaan			
Unit Organisasi : 2.17.01				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01				Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
NO. URUT	URAIAN			ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	
2	BELANJA			16.757.158.066,00	16.270.196.687,00	(486.961.379,00)	
2.1	BELANJA OPERASI			16.156.233.066,00	15.687.908.367,00	(468.324.699,00)	
2.1.1	Belanja Pegawai			11.628.364.066,00	11.199.941.356,00	(428.422.710,00)	
2.1.2	Belanja Barang			4.527.869.000,00	4.487.967.011,00	(39.901.989,00)	
2.2	BELANJA MODAL			600.925.000,00	582.288.320,00	(18.636.680,00)	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin			600.925.000,00	582.288.320,00	(18.636.680,00)	
				(16.757.158.066,00)	(16.270.196.687,00)	486.961.379,00	
				(16.757.158.066,00)	(16.270.196.687,00)	486.961.379,00	

Jambi, 1 Januari 2018

Pengguna Anggaran







PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
NERACA

Per 31 Desember 2018 dan 2017  
(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Unit Organisasi	: 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sub Unit Organisasi	: 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

KD. REK	URAIAN	2018	2017
1	<b>ASET</b>		
1.1	<b>ASET LANCAR</b>		
1.1.1	Kas	229.861.764,00	0,00
1.1.2	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
1.1.3	Piutang	0,00	0,00
1.1.4	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.5	Persediaan	0,00	0,00
1.1.6	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
1.1.7	Biaya Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>229.861.764,00</b>	<b>0,00</b>
1.2	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
1.2.1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00
1.2.2	Investasi Permanen	0,00	0,00
1.2.3	Penyisihan Piutang Dana Bergulir	0,00	0,00
	<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3	<b>ASET TETAP</b>		
1.3.1	Tanah	0,00	0,00
1.3.2	Peralatan dan Mesin	8.978.981.330,34	8.396.693.010,34
1.3.3	Gedung dan Bangunan	2.599.607.500,00	2.599.607.500,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	297.377.778,00	297.377.778,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	2.829.430.458,00	2.829.430.458,00
1.3.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7	Akumulasi Penyusutan	(7.709.435.964,88)	(6.869.295.802,73)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>6.995.961.101,46</b>	<b>7.253.812.943,61</b>
1.4	<b>DANA CADANGAN</b>		
1.4.1	Dana Cadangan	0,00	0,00
	<b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5	<b>ASET LAINNYA</b>		
1.5.1	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4	Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5	Aset Lain-lain	249.800.000,00	2.118.899.934,83
1.5.6	Akumulasi Amortisasi	0,00	0,00
1.5.7	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>249.800.000,00</b>	<b>2.118.899.934,83</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>7.475.622.865,46</b>	<b>9.372.712.878,44</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>		
2.1	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00
2.1.3	Utang Pajak	0,00	0,00
2.1.4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
2.1.9	Utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00
2.1.10	Utang Belanja Jasa Kantor	14.971.002,00	14.432.054,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>14.971.002,00</b>	<b>14.432.054,00</b>
2.2	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		
2.2.1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2.2.2	Utang Luar Negeri	0,00	0,00





PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 2.17		Perpustakaan			
Unit Organisasi : 2.17.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
Sub Unit Organisasi : 2.17.01.01		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2018	SALDO 2017	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.2	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.3	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.2	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	14.607.080.829,88	0,00	14.607.080.829,88	0,00
9.1	BEBAN OPERASI	14.607.080.829,88	0,00	14.607.080.829,88	0,00
9.1.1	Beban Pegawai - LO	10.525.313.924,00	0,00	10.525.313.924,00	0,00
9.1.1.1	Beban Barang dan Jasa	3.684.681.100,00	0,00	3.684.681.100,00	0,00
9.1.1.2	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.3	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00







PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

<b>Urusan Pemerintahan : 2 . 17</b> Perpustakaan		
<b>Unit Organisasi : 2 . 17 . 01</b> Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
<b>Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01</b> Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
URAIAN	2018	2017
EKUITAS AWAL	(5.881.909.117,56)	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(14.607.080.829,88)	0,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lancar	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.609.523,81)	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	(1.869.099.934,83)	0,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penilaian Pencatatan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas atas Beban Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Pengakuan atas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Piutang Dana Bergulir dan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lain-lain	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	31.100.634.197,00	0,00
EKUITAS AKHIR	8.740.934.790,92	0,00

Jambi, 31 Desember 2018

Pengguna Anggaran







## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

### TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1. Maksud dan tujuan Penyusunan laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan, laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu ketaatannya terhadap perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta resiko dan tidak kepastian yang terkait.

Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik yaitu :

- 1.1. Menyediakan informasi tentang sumber dana, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- 1.2. Menyediakan informasi mengenai kecakupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 1.3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai.



- 1.4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan memadai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya.
  - 1.5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode Pelaporan.
  3. Laporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

Aset,

Kewajiban,

Ekuitas dana,

Pendapatan,

Belanja,

Transfer,

Pembiayaan dan

Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menyajikan informasi bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.

2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undang.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan dapat mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 2. Landasan Hukum Penyusunan laporan Keuangan.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepatisme ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu laporan Keuangan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahannya ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;



18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi ;

## 1. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD

### BAB I. Pendahuluan.

- 1.1. Maksud Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

### BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
- 2.2. Sifat operasi entitas dan kegiatan pokok
- 2.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

### BAB III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

- 3.1. Ekonomi Makro
- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target.

### BAB IV. Kebijakan Akuntansi.

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan laporan Keuangan
- 4.3. Transisi Laporan Keuangan dari Basis Kas Modifikasian Basis Akrua
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

## BAB V. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Keuangan

1. Penjelasan Pos-pos Akun laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Pendapatan
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pembiayaan
  - 5.1.4. Aset
  - 5.1.5. Kewajiban
  - 5.1.6. Ekuitas Dana
2. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Perubahan Salda Anggaran Lebih (LPSAL) dan Laporan Operasional (LO)
  - 5.2.1. Pendapatan – LO
  - 5.2.1. Beban
  - 5.2.1. Kegiatan Non Operasional
  - 5.2.1. Luar Biasa
3. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Pos-pos Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
4. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.4.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasional
  - 5.4.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
  - 5.4.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
  - 5.4.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5. Penjelasan Pengungkapan atas informasi penting lainnya yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan.
  - 5.5.1. Informasi tambahan Penggantian Manajemen selama tahun berjalan.
  - 5.5.2. Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi manajemen baru
  - 5.5.3. Koreksi dan kontinjensi
  - 5.5.4. Penggabungan atau pemekaran entitas akuntansi pada tahun berjalan.

### BAB III. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

#### 3.1. Ekonomi Makro

Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2018 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan, gambaran ekonomi tersebut dapat dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2019.

#### 3.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pembangunan dan pelaksanaan program kegiatan,

Kebijakan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Jambi pada Tahun 2016 – 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi.

#### 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/hambatan Pencapaian Target.

Capaian target kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018, telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan berpedoman pada (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

### BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI.

#### 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan

#### 4.2. Akuntansi Berbasis Akrua Basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan

#### 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan .

#### 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi

#### 4.5. Penjelasan Pos-pos laporan Keuangan



## BAB V. Penjelasan Pos-pos Akun Laporan Keuangan

### 5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-pos laporan Keuangan

#### 5.1.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periodik tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kasda, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompilasikan dengan pengeluaran) atau dengan kata lain pendapatan daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih.

#### 5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Daerah, Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disyahkan oleh Dinas Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Jambi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

#### 5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

#### 5.1.4. Aset

Asset adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang ,

termasuk sumber daya non keuangan yang diperoleh untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, dalam pengertian asset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan, asset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah, asset diklasifikasikan menjadi asset lancar, asset tetap dan asset lainnya.

Pengukuran/penilaian Asset.

##### 1. Persediaan

Persediaan disajikan sebagai berikut :

Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian, maka biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, potongan harga dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan dan nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

##### 2. Biaya standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.



### 3. Tanah.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan, biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

### 4. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan maka nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola yang meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

### 5. Peralatan dan mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

### 6. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.

Biaya aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya perizinan atau yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang terdiri biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan serta perizinan dan jasa konsultan.

#### 5.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran dana keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

#### 5.1.6. Ekuitas dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah, ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinvestasikan.

### 1 Ringkasan Laporan

#### a. Laporan reliasasi keuangan

Realisasi belanja operasional yang terdiri dari belanja tidak Langsung gaji pegawai dan belanja langsung belanja barang dan jasa/belanja modal pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi periode Januari s.d 31 Desember 2018.

#### b. Neraca.

Posisi Neraca sampai dengan 31 Desember 2018



T A B E L

NAMA ASET TETAP	SALDO AWAL 2017	MUTASI		SALDO AKHIR 2018
		TAMBAH	KURANG	
Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	8.396.693.010,00	0,00	0,00	8.978.981.330,34
Gedung dan Bangunan	2.599.607.500,00	0,00	0,00	2.599.607.500,00
Jalan Jaringan dan Instalasi	297.377.778,00	0,00	0,00	297.377.778,00
Asset Tetap lainnya	2.829.430.458,00	0,00	0,00	2.829.430.458,00
Akumulasi Penyusutan	(6.869.295.802,73)	0,00	0,00	(7.267.991.132,44)
Jumlah Aset Tetap	7.253.812.943,61	0,00	0,00	7.437.405.933,92
Aset Lain-lain	2.118.899.934,83	0,00	0,00	249.800.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	2.118.899.934,83	0,00	0,00	249.800.000,00
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>9.372.712.878.44</b>		<b>0,00</b>	<b>7.687.205.933,92</b>
Utang Belanja Jasa kantor	14.432.054,00	0,00	0,00	14.432.054,00
JUMLAH KWAJIBAN JANGKA PENDEK	14.432.054,00	0,00	0,00	14.432.054,00
<b>JUMLAH KWAJIBAN</b>	<b>14.432.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432.054,00</b>
Jadangan untukpersediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana yg disediakan untuk pembayaran utang	(14.432.054,00)	0,00	0,00	(14.432.054,00)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	(14.432.054,00)	0,00	0,00	(14.432.054,00)
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	7.253.812.943,61	0,00	0,00	7.437.405.933,92
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk dana Cadangan)	2.118.899.934,83	0,00	0,00	249.800,00
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	9.372.712.878,44	0,00	0,00	6.687.205.933,92
JUMLAH EKUITAS DANA	9.358.280.824,44		0,00	7.672.773.879,92
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>9.372.712.878,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687.205.933,92</b>

≥ Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar adalah kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban Aset lancar/jangka pendek, yang terdiri dari :

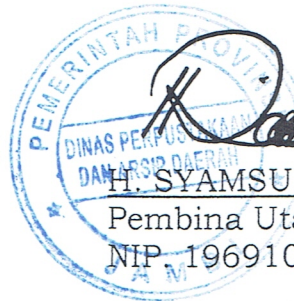
- Cadangan piutang : Rp. Nihil
- Cadangan persediaan : Rp. Nihil

#### BAB.VI. Penutup

Demikian laporan keuangan disusun dalam rangka pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam mendukung terwujudnya Pemerintahan yang baik dan lebih baik dimasa mendatang.

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN ARSIP DAERAH



H. SYAMSURIZAL, SE. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691003 199803 1 005